
FAN-IITTS PUBLICATION

Alor, Flores, Lembata, Rote, Sabu, Sumba, Timor



Journal of NTT Studies

2 (1) (2010) 001-006

ISSN: 20856504

**Journal of
NTT
Studies**

Open Access

PENGANTAR EDITOR


Pembangunan: Dari Indologi Leiden hingga Pusat Studi Indonesia Timur: (Sebuah interpretasi atas *Development as Freedom* Amartya Zen)

Dominggus Elcid Li

(a) Department Sociology, University of Birmingham (Authors' correspondence: elcidli@yahoo.com)

Permanent link of this article: <http://ntt-academia.org/nttstudies/elcid2010>

The Interdisciplinary Journal of NTT Development Studies - An International Bilingual Journal.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode>) License: 

Today, in spite of the ominous outlook research, research, and experimentation are impeded by lack of funds and staff. Moreover, the situation cannot wait until the problems have been clarified by investigation and research. For the time being, Timor will be largely dependent on her own power.

Ormeling, in 'The Timor Problem', 1981 [1956]

Kutipan pembuka dari Ormeling ini menyimpulkan mimpi Tulisan Ormeling di atas menjadi penting dengan pernyataannya 'untuk saat ini Timor akan lebih tergantung dengan kekuatannya sendiri' (*For the time being Timor will be largely dependent on her own power*). Kontrasnya, di kalimat sebelumnya ia menyinggung soal eksperimen, penelitian dan minimnya staf dan dana dalam menjelaskan 'The Timor Problem'. Penelitian Ormeling sendiri dilakukan di era transisi pemerintahan dari Hindia Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS), yang kemudian bertahan dalam format negara kesatuan (*unitary state*) hingga saat ini.

Model penelitian Ormeling mewakili paradigma modernitas sebagai bagian dari pengembangan cara berpikir baru yang dianggap akan mampu menyumbangkan tenaga dalam membuka persoalan sehari-hari. Apakah 'persoalan' (*problem*) yang dimaksud dalam cakrawala pengetahuan Ormeling yang mewakili Orang Eropa akan sama persis dengan apa yang dimaksudkan dengan 'persoalan' dalam pengetahuan Orang Timor tidak dijelaskan, sebab apa yang dimaksudkan dengan pengetahuan dalam masyarakat Timor sendiri tidak diketahui oleh orang Eropa maupun kini oleh para kaum terdidik di Timor ala Eropa.

Periode penelitian Ormeling ada di era transisi pemerintah Hindia Belanda. Fase moderen lanjutan ini ditandai dengan masuknya birokrasi Jakarta ke Timor Barat. Meskipun birokrasi moderen juga dipakai Belanda, tetapi perbedaannya pembentukan birokrasi di tingkat yang paling rendah terjadi di era Indonesia. Secara khusus ini periode ini perlu dibedakan dalam tiga tahap: (1) periode Sukarno, (2) periode Soeharto, dan (3) periode pasca Suharto. Bagaimana para elit baru pasca Belanda menafsirkan pengertian kedaulatan, dapat dilihat dari model dan strategi pemerintahan di masing-masing era. Meskipun jelas terdapat perbedaan dasar dalam pengelolaan pemerintahan di tiga periode ini, namun persamaannya di ketiga era ini, pengetahuan moderen yang dikembangkan di Eropa maupun di AS, sebagai antitesis Eropa, merupakan peta panduan pembangunan.

Pembangunan di periode Sukarno bukan menjadi jargon utama. Jargon utama di era Sukarno adalah persoalan kedaulatan. Hingga akhir hayatnya Sukarno memperjuangkan kedaulatan tanpa ada di bawah bayang-bayang negara adikuasa. Sebaliknya, di era pemerintahan Soeharto, 'pembangunan' menjadi kata kunci pasca pembantaian massal di akhir tahun 1960-an. Dalam skema ini pembangunan maupun bantuan (*aid*), di era Soeharto pembangunan masih serupa dalam skema 'politik etis' tujuh dekade silam.

Idiom 'pembangunan' sebagai kata kunci Orde Baru tak jauh berbeda dengan politik etis Belanda. Jika pembangunan (*development*) di era politik etis Belanda dikenal dengan sebutan *ontwikelling*, dan menekankan 'the Dutch role as tutors to the indigenous people' (Moon, 2007: 19), maka di era Orde Baru para tutornya berasal dari AS. Bantuan yang disalurkan kepada yayasan karitatif di Timor Barat pun mulai masuk di tahun 1968 sebagai bagian dari perubahan politik luar negeri Indonesia maupun akibat dari pergantian presiden--yang prosesnya masih merupakan pertanyaan bersejarah bagi generasi saat ini.¹

Kini di Timor yang manusia yang di-didik dalam sekolah moderen kembali melihat masyarakatnya sendiri dengan menggunakan kacamata pendidikan Eropa. Jadi proses keterasingan (alienasi) tidak semata terbatas pada kepemilikan alat produksi, seperti yang menjadi tesis utama Karl Marx,² tetapi proses keterasingan itu sendiri dimulai dari proses produksi pengetahuan. Khususnya bagaimana proses berpengetahuan dimaksudkan untuk menjelaskan perkara hidup sehari-hari, maupun bagaimana pengetahuan dikembangkan untuk menghadapi tantangan alam. Entah itu terkait relasi manusia setempat dengan pasar setempat (lokal), maupun pasar uang (*finance*) yang amat mempengaruhi harga barang di pasar setempat hingga imajinasi para kaum terdidiknya.

Di titik ini pengetahuan lokal dirasakan menjadi tidak cukup karena 'variabel penentu' tidak lagi berasal dari lingkungan sekitarnya, selain itu apa yang dimaksud dengan 'pengetahuan' masyarakat pra sekolah di NTT secara umum tidak diketahui.³ Dalam dua makalah awal

¹ Wawancara dengan salah satu penggiat LSM di tahun 2005.

² Dalam pandangan Marx, alat produksi harus ada dalam kendali kelas pekerja (proletariat), dan dalam fase lanjutan pembentukan negara di era Lenin, negara dikembangkan dalam model monopoli kekuasaan oleh kelas pekerja. Model negara semacam itu ternyata hanya bertahan hingga tahun 1989. Sedangkan Indonesia yang mengembangkan model negara otoritarianisme militer (1967-1998), institusi kenegaraannya juga hancur di tahun 1997 akibat krisis mata uang.

³ Pandangan Amartya Sen (1999: 185-187) tentang transparansi sistem financial sebagai sumber utama krisis Indonesia di tahun 1997 menjadi tidak cukup dalam konteks Indonesia. Sebab apa yang dimaksud dengan 'hak' dan 'merdeka' oleh orang-orang biasa tidak dikenal oleh para intelektual Indonesia sendiri alias hak orang-orang biasa ini tidak diakui. Akibatnya *pseudo-democracy* yang sedang dialami hingga saat ini (2010) pun tidak disadari. Sebab dalam asumsi para elit saat ini, warga negara ada dalam posisi pasif yang harus siap dimoderenkan. Contohnya, hak-hak warga setempat atas tanah ulayat cenderung tidak diketahui sebaliknya globalisasi yang menempatkan investor sebagai kasta tertinggi dan modernisasi yang dibawa oleh para intelektual pun senantiasa merupakan proses 'pengasingan' (alienasi). Hak warga atas 'tanah' dan 'air' dalam

dalam jurnal edisi ini merupakan hasil pengembangan dari kajian dua Ornop yang bekerja di wilayah Timor, PIKUL dan PMPB, untuk melihat pengertian kemiskinan dan kelaparan di Timor dengan memahami ‘tanda-tanda penderitaan’ yang dimaknai penduduk setempat dan dilengkapi dengan sejarah sosialnya, terutama menyangkut perubahan organisasi sosialnya.

Persoalan produksi pengetahuan dalam tulisan ini tidak berada dalam perkara politik identitas, tetapi sejauhmana kita memahami ‘patahan’ para manusia terdidik dari NTT yang mengadopsi pengetahuan moderen untuk menjelaskan realitas yang ada. Adopsi paradigma moderen yang dilakukan para elit terdidik menempatkan imajinasi moderen sebagai sebuah kerangka tunggal yang siap dijalankan di daerah yang masih ‘tertinggal’. Proses ini dilakukan dengan mengandaikan pengetahuan lokal setempat dianggap tidak ada atau ada dalam posisi nol. Dalam standar rasionalitas tertentu, pengetahuan setempat dianggap sebagai mitos. Jika model berpengetahuan setempat turut dikembangkan di Timor maka konsep merdeka (*freedom*) maupun hak (*right*) menurut masyarakat setempat perlu ditelusuri untuk menjawab liberalisasi ekonomi yang terjadi di wilayah Provinsi Kepulauan NTT khususnya pasca jatuhnya Soeharto.

Konsep hak masyarakat untuk bertahan hidup yang dikembangkan Sen (1999: 162-163), dalam kaitannya dengan kemampuan produksi dan pasar berkaitan dengan tiga hal : (1) kepemilikan sumber-sumber produksi (*endowment*), (2) kemampuan dan kemungkinan produksi, dan (3) kondisi pertukaran.

Masih dalam kerangka kajian Sen, persoalan tambang mangan yang marak di Timor Barat hari ini masih ada dalam tiga hal ini. Dari sisi alat produksi, maupun pengetahuan tentang tambang masyarakat setempat yang berlaku sebagai pekerja sekaligus pemilik lahan tidak memiliki posisi tawar. Akibatnya meskipun berstatus sebagai pemilik tanah, nasibnya tetap saja ada dalam posisi korban. Alat produksi yang dimaksud masih sebatas ‘tangan dan alat gali’, dan kemudian disusul terbatasnya kemampuan produksi untuk jangka waktu panjang, bisa dipastikan proses produksi di kemudian hari pasti jatuh ke tangan perusahaan dengan teknologi moderen. Sedangkan kondisi pertukaran juga tidak diketahui, karena warga tidak memiliki akses informasi tentang harga terbaik tentang batu mangan. Mundur ke periode sebelumnya, di Timor Barat pun skema produksi amat berkaitan dengan sistem pertukaran. Barang-barang produksi masyarakat dihargai dengan amat rendah, sebaliknya barang-barang industri dibeli dengan harga tinggi. ‘Kondisi pertukaran’ amat terkait dengan pandangan warga setempat tentang ‘mitos ketertinggalan’. Konkritnya dalam hidup sehari-hari sesuatu yang datang dari luar nilainya cenderung lebih tinggi daripada apa yang dibuat di dalam. Ini tak hanya soal produksi barang tetapi produksi pengetahuan. Bukan hanya soal warga di pedalaman yang takjub melihat barang-barang industri, tetapi kekaguman kaum terdidik terhadap segala pengetahuan moderen hingga tak lagi mau mengenal sejarah nenek moyang.

Terkait dengan persoalan ‘ruang’, pengetahuan setempat atau lokal menjadi amat terbatas jangkauannya, karena memang tidak pernah dimaksudkan untuk ‘ada’ dalam dalam ruang global. Pengetahuan setempat di satu sisi memang tidak bernalar ekspansif. Pengetahuan setempat tidak memiliki karakter menaklukan karena memang tidak pernah dijadikan sebagai kerangka global. Namun kini di saat yang sama dalam skema evolusionis proses hidup masyarakat setempat diletakan dalam tahap tertinggal, atau dalam tahap *pembangunan* sebagai bagian dari modernisasi. Meskipun, paradoksnya dalam skema modernitas masyarakat lokal senantiasa dipandang ‘kekurangan tenaga’ atau senantiasa dalam kondisi kekurangan.

berbagai kasus tambang marmer di Timor (Barat) diabaikan begitu saja. Kasta ‘pengetahuan’ itu sendiri merupakan narasi baru dalam me-legalkan penguasaan hak hidup masyarakat setempat.

Setengah abad setelah penelitian Ormeling dibuat, paradigma modernitas merupakan paradigma utama. Sedangkan apa yang disebut pengetahuan Orang Timor yang diasumsikan Ormeling sebagai 'kekuatan untuk bertahan' tidak diketahui. Dalam mazhab pembangunan (*developmentalism*) versi negara, maupun antitesanya oleh berbagai Ornop yang hadir karena birokrasi negara tidak mampu dijalankan sehingga perlu diadakan lembaga tandingan pengkritik, apa yang disebut pengetahuan masyarakat yang belum tersentuh pendidikan moderen dianggap tidak ada. Proses pengabaian semacam ini juga disebut sebagai proses kolonialisme. Sebab ibu pengetahuan ('her power') tidak dikenal lagi. Daya bertahan itu dianggap nol, sekaligus kemampuan untuk bertahan juga dianggap nol, dan kini sebagai pihak penyelamat hanya ada di tangan investor, juga berbagai Ornop internasional yang bekerja di wilayah ini.

Saat ini kajian-kajian regional terkait persoalan NTT maupun Timor khususnya dalam skema besarnya senantiasa melihat 'praktek hidup' Orang Timor dalam skema pembangunan. Praktek hidup Orang Timor senantiasa dianggap tertinggal. Pertanyaannya, jika kembali pada tradisi moderen yang lekat dengan proses validitas pengetahuan, bagaimana proses penentuan tertinggal itu dilakukan jika tidak pernah dikenal. Klaim universalitas pengetahuan sendiri tidak peka pada pemunahan pengetahuan masyarakat setempat. Kritik terhadap dominasi dan ekspansi pasar global telah dialamatkan oleh berbagai pihak dalam kerangka kritis neo-liberalisme.

Dalam kaitannya dengan kelaparan (*famine*), Amartya Sen, menyatakan bahwa persoalan kelaparan seharusnya disederhanakan hanya sebagai persoalan ketersediaan pangan (*food*) dan jumlah penduduk (*population*). Menurut Sen (1999: 162) salah satu hal yang harus diperhitungkan adalah "hak" (*entitlements*) warga untuk mengakses pangan. Jika semula daya hidup atau hak warga atau *entitlements* yang disebut Sen itu disejajarkan dengan asumsi 'her power' yang disebut Ormeling maka dapat dimengerti pengertian kemampuan yang dimaksud. Lebih jauh lagi jika "kemampuan untuk mengakses" tidak hanya terbatas pada 'uang' dan 'barang', maka dapat dimengerti bahwa *entitlements* yang dipaparkan Sen pada hakikatnya adalah kemampuan untuk bertahan, atau lebih jauh lagi untuk berdikari (berdiri di atas kaki sendiri).

Jika kemampuan berpengetahuan juga dianggap sebagai salah satu bentuk kemandirian maka seharusnya dalam berpengetahuan, orang tidak dibikin sebagai penerima pasif dan tergantung. Konsep ketergantungan itu sendiri tidak terbatas pada 'ketersediaan barang semata', mengikuti analogi yang ditawarkan Sen untuk melihat hubungan antara 'pangan' dan 'populasi'. Tetapi ia menawarkan cara lain untuk melihatnya, yakni di tingkat yang lebih mendasar bagaimana berbagai aspek tadi membuat manusia mampu merdeka dari rasa lapar.

Pengertian ini penting untuk memahami apa yang dimaksudkan Sen dengan tesisnya *development as freedom*. Sebaliknya jika dalam proses modernisasi yang sedang terjadi saat ini, dengan dua kata kunci 'pembangunan' (*development*) dan kemajuan (*progress*) turut membuat ruang imajinasi 'Orang Timor' senantiasa merasa kurang dan tidak mampu maka perlu dipertanyakan apa yang sedang terjadi. Dominasi tidak lagi terbatas pada penguasaan ruang (kolonialisme), tetapi juga menjangkau sisi dalam manusia yakni 'imajinasinya tentang hidup'.

Kemiskinan dan kelaparan merupakan dua tema populer dalam *mazhab* pembangunan sebagai penanda penderitaan. Kedua tema ini dalam pandangan 'orang moderen' dipetakan oleh ahli geografi asal Belanda, Ormeling. Proses studi Ormeling menandakan proses modernisasi merupakan 'sesuatu yang asing'. Studi itu sendiri terjadi di masa transisi Belanda-Indonesia, untuk menyebut hadirnya Indonesia sebagai negara baru sebagai akibat

lain dari Perang Dunia Kedua.⁴ Pembangunan baru menjadi kata kunci utama di era Orde Baru khususnya sejak dimulainya ‘Pelita’ (Pembangunan Lima Tahun).

Dalam pandangan Ormeling (1981 [1956]) wilayah Timor Barat dikategorikan sebagai *underdeveloped*. Kini setelah lebih dari setengah abad setelah penelitian Ormeling paradigma pembangunan masih merupakan pandangan dominan yang dimiliki oleh para pegawai negeri sipil pemerintah Republik Indonesia, maupun para pekerja Ornop di Timor Barat. Bagaimana paradigma pembangunan dalam kosmologi Orang Timor hingga kini belum menjadi tema penelitian dasar. Sebaliknya penelitian terbanyak yang dilakukan di Timor Barat sifatnya *project* singkat yang merupakan pendanaan pemerintah daerah/pusat maupun ornop. Cita-cita penelitian dasar yang diangankan oleh Ormeling sejak tahun 1956 hingga kini masih merupakan agenda yang terlupakan, khususnya terkait bagaimana generasi ini menafsirkan pembangunan sebagai kemerdekaan. Bagaimana mungkin kosep pembangunan adalah bagian dari kemerdekaan jika takluk telah dimulai sejak dalam ‘pemikiran’? Kelaparan dan kemiskinan tak hanya ditandai dengan ada tidaknya bahan makanan, tetapi lebih dari itu tentang pudarnya figur manusia merdeka.

Pudarnya manusia merdeka secara *riil* ditandai dengan merajalelanya para ‘politikus bajak laut’ yang mendominasi seluruh organisasi politik. Skema desentralisasi yang dikembangkan pasca kejatuhan Rezim Orde Baru hanya bertujuan untuk proses perdagangan khususnya dalam akses bahan mentah untuk kepentingan industri negara-negara maju. Dalam kepongkapan para pemodal, slogan pembangunan menjadi alat legitimasi yang menjempit masyarakat NTT tanpa mampu bersuara. Desentralisasi pemerintahan yang tidak disertai dengan desentralisasi partai politik mengakibatkan masyarakat di daerah pinggiran senantiasa ada dalam tawanan politikus maupun investor.

Partai politik yang beroperasi dalam sistem sentralistik mengambil alih seluruh kedaulatan masyarakat setempat. Apalagi jika dipahami bahwa proses perwakilan yang sentralistik cenderung membuat partai politik tak lebih dari ‘kartel politik’. Sistem pungutan partai politik secara terpusat yang diambil dari para wakilnya di daerah maupun ‘di pusat’ tak berbeda dengan sistem upeti. Hirarki kekuasaan ini pada akhirnya hanya memberikan korban untuk rakyat jelata. Sistem pengelolaan partai politik model ini tak ada bedanya dengan proses penguasaan di era Belanda yang mengadopsi skema *indirect rule*. Dalam skema penjajahan terselubung, pembangunan tak lebih dari sekedar ‘politik balas budi’ untuk menghapus rasa bersalah. Di tengah-tengah situasi penjajahan ini, kajian *scientific* para perencana pembangunan maupun laporan lembaga bantuan regular (baca: LSM) tentang pembangunan secara nyata mengabaikan suara masyarakat setempat. Pembangunan bukan hanya soal partisipasi, atau keterlibatan manusia, tetapi soal imajinasi pembangunan oleh manusia di tanah itu sendiri, agar pembangunan tidak sekedar duplikasi kota-kota moderen di negara maju sebagai tujuan yang seolah-olah pasti, dan tidak memberikan ruang imajinasi apalagi refleksi karena kita ditempatkan sebagai penerima pasif.

Jika munculnya ‘indologi’ di Leiden di awal abad 20 merupakan fase lain Orang Belanda memahami warga di koloninya, disusul studi kawasan tentang Indonesia pasca Perang Dunia Kedua di AS, maka kini pasca reformasi di berbagai pusat studi di berbagai universitas di Pulau Jawa ramai-ramai mendirikan pusat studi Indonesia Timur. Watak orang moderen Indonesia melihat ‘timur’ tak jauh berbeda dengan dengan para ‘indolog’. Hirarki pengetahuan dari para tenaga ahli di titik puncak dalam mengesekusi proyek pembangunan, memang berhasil menunjukkan kemampuan meniru tetapi gagal dalam mewujudkan manusia yang merdeka. Singkatnya, ‘development as freedom’ yang digambarkan Sen tidak mungkin

⁴ Proses ekspansi Jerman di Eropa dan Jepang di Asia merupakan faktor penting hadirnya negara baru: Indonesia, yang batas negaranya mencakup seluruh wilayah *Netherlands East Indies*.

terjadi pada manusia yang tidak bisa bersuara maupun yang eksistensinya tidak diakui, bahkan tidak ingin dikenal oleh para 'kaum terdidiknya'.

Referensi

Feith, Herbert 1962 . *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press

Moon, Suzanne 2007 . *Tehconolog and Ethical Idealism: a History of Development in the Netherlands East Indies*. Leiden: CNWS Publications.

Ormeling, F. J. 1955. *The Timor problem : a geographical interpretation of an underdeveloped island* Jakarta & Groningen: J.B Wolters.

Sen, Amartya 1999. *Development as Freedom*, Oxford: Oxford University Press

Sen, Amartya 2004. *Elements of a Theory of Human Rights*, *Philosophy & Public Affairs* 32, no.4

Vandenbosh, Amry 1942. *The Dutch East Indies: Its Government, Problems, and Politics*.